



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**UNIT KERJA : UNIVERSITAS JEMBER**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SRI HERNAWATI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN DAN UMUM**
3. NHK : **458238**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 9.580.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 4.590 m2/1.000 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
3. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/550 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/200 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/22 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 268 m2/268 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
9. Tanah Seluas 7.880 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, Rp. 450.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 560.000.000**



1. MOTOR, HONDA SCUPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
10.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 518.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 245.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 10.903.500.000

III. HUTANG Rp. 1.100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.803.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.